

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN lainnya memiliki kesepakatan untuk mewujudkan *ASEAN Drug Free Area*, dan dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia menerapkan kebijakannya sesuai dengan *guideline* yang telah disepakati bersama dalam *ASEAN Drug Free Area*. Sesuai dengan *ASEAN Drug Free Area*, fokus terhadap *supply and demand reduction* menjadi perhatian utama bagi negara untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Berbagai macam upaya dan kebijakan secara garis besar dikategorikan ke dalam kedua hal tersebut tersebut.

Aspek *supply* atau penawaran merupakan bentuk upaya penanganan penyalahgunaan narkoba yang didalamnya termasuk upaya seperti razia ataupun operasi tangkap tangan, memperketat perbatasan ataupun jalur masuk ke Indonesia baik darat, laut, maupun udara, melakukan upaya dan proses hukum bagi bandar dan kurir narkoba, dan upaya lainnya yang memiliki tujuan untuk menghentikan pasokan narkoba agar tidak sampai ke tangan masyarakat. Sedangkan di satu sisi, aspek *demand* atau permintaan upaya yang termasuk di dalam kategori ini adalah upaya seperti rehabilitasi, bimbingan bagi para mantan pengguna agar tidak kembali mengonsumsi narkoba, penyuluhan, sosialisasi, dan berbagai macam upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif narkoba sehingga permintaan terhadap narkoba minimal mampu

diminimalisir. Dari kedua pendekatan ini, kemudian dalam *ASEAN Drug Free Area* dibagi ke dalam enam kategori atau aspek. Keenam aspek tersebut adalah (i) Edukasi preventif, (ii) penegakan hukum, (iii) pengobatan dan rehabilitasi, (iv) penelitian, (v) pengembangan alternatif, dan (vi) hukum dan kerjasama.

*Pertama*, aspek edukasi preventif adalah aspek yang bertujuan untuk memberantas narkoba dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan pembangunan wawasan dan pemberdayaan anti narkoba. Indonesia menggiatkan kegiatan ini dengan total mengadakan 12.566 kegiatan yang melibatkan 9.177.785 orang, dan telah membentuk 15.772 relawan P4GN yang siap sedia membantu BNN dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dikemas dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan keterampilan sebanyak 2.932 kegiatan dengan melibatkan 423.961 orang pada periode 2015-2016.

*Kedua*, aspek penegakan hukum adalah dengan melakukan intensifikasi operasi tangkap tangan dan melakukan koordinasi antar instansi negara. Dalam hal ini BNN melakukan koordinasi dengan Polri dan TNI untuk mengintensifkan operasi tangkap tangan dan investigasi, serta Kementerian Sosial dan BNN yang bersama-sama melakukan kegiatan rehabilitasi penyalahguna narkoba.

*Ketiga*, aspek pengobatan dan rehabilitasi dimana rehabilitasi menjadi hal utama yang harus dilakukan untuk menghindarkan penyalahguna untuk kembali menggunakan narkoba. Presiden Joko Widodo menanggapi masalah rehabilitasi sangat dibutuhkan oleh Indonesia dan menargetkan untuk merehabilitasi 100 ribu

penyalahguna dan membangun tujuh pusat rehabilitasi narkoba baru yang tersebar di Indonesia.

*Keempat*, adalah aspek penelitian yang penting dilakukan untuk mengidentifikasi jenis narkoba baru dan jalur masuk narkoba ke Indonesia. Jenis narkoba yang marak beredar di Indonesia adalah jenis ATS (*amphetamine type stimulant*) seperti sabu kristal yang berasal dari Iran, Eropa Barat, dan China yang mengalami transit terlebih dahulu sebelum masuk ke Indonesia. Sedangkan hingga akhir tahun 2016 setelah melakukan berbagai macam investigasi dan penelitian, Balai Laboratorium BNN total mengkategorikan 46 substansi sebagai *new psychoactive substance* sekaligus menambah daftar narkoba jenis baru.

*Kelima*, adalah aspek pengembangan alternatif. Yang dimaksud dengan pengembangan alternatif disini adalah diberlakukannya substitusi antara tanaman ganja dengan komoditas lain. Di Indonesia, total BNN mengeradikasi 79 hektar ladang ganja yang semuanya berada di provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kegiatan substitusi komoditas yang dilakukan BNN di provinsi tersebut terlihat seperti di Kabupaten Bireun dimana ada tiga kelompok mantan petani ganja yang sudah beralih menanam aneka tanaman palawija. BNN juga memberdayakan para mantan petani ganja di enam kecamatan lain di Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Gayo Lues. Sedangkan untuk pemasaran hasil panen, BNN menjalin kerja sama dengan mitra terkait. Guna mewujudkan hal itu, BNN menyerahkan bantuan berupa bibit kopi dan kakao sebagai komoditas unggulan serta memberi bantuan sarana-prasarana.

*Keenam*, aspek hukum dan kerjasama baik di level nasional maupun secara bilateral. Indonesia sudah sejak lama menaruh perhatian terhadap narkoba terbukti sejak keikutsertaan Indonesia dalam *ASEAN Drug Free Area* yang dicanangkan sejak tahun 1999 silam, pada tahun 2003 dengan adanya komitmen untuk memberantas narkoba lahir BNN sebagai aktor utama dalam pemberantasan narkoba. UU Narkotika tahun 2009 pun menegaskan komitmen akan pemberantasan narkoba di Indonesia. Dalam level bilateral, Indonesia terus membangun komunikasi dan kerjasama dengan negara lain dalam upaya pemberantasan narkoba dengan cara melakukan pertukaran informasi dan teknologi dengan menyusun nota kesepahaman. Negara yang telah memiliki nota kesepahaman dengan Indonesia dalam hal pemberantasan narkoba adalah Filipina, Thailand, dan Kolombia. Indonesia juga secara intensif melakukan komunikasi dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia untuk mewujudkan kerjasama bilateral.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis ingin memberikan saran bagi lembaga maupun peneliti selanjutnya.

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa, diharapkan mampu mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi agar menghasilkan karya yang lebih lengkap dan lebih baik. Peneliti selanjutnya juga diharapkan mampu mengkaji dan membahas situasi ini dengan

teori-teori lain untuk memperkaya literasi studi hubungan internasional di Indonesia.